

The Role Of Haji Sulong In Fighting Special Autonomy For Patani Southern Thailand (1947-1954)

Husam Lamato ^a, Sumarno ^b, Nurul Umamah ^c

^aHistory of Education program, jember university. Email: san.fatani2014@gmail.com.

^bHistory of Education program, jember university. Email: Sumarno@unej.ac.id

^cHistory of Education program, jember university. Email: nurul umamah70@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the role of Haji Sulong in Fighting Special Otomomi Pattani southern Thailand in the year 1947- 1954. This study uses historical research while the approach used is sosialogi politics. The results of show that Changes are most keenly felt by the Patani Malay Community when the government Phibun Songkram the establishment of a political system siamisasi (Rotsaniyom) of political, then Haji Sulong rise spirit Patani Malay society, in the face of political, so that Haji Sulong thus making the people's demands are the demands of 7 cases, to Thai government, the contents of these demands to get a special autonomous region that has its own political and cultural identity. The implications of this research as a hope for other research or information considered to do the kind of research and development at the same time.

Keywords: Haji Sulong, special autonomy and Patani

PENDAHULUAN

Thailand adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara kultural, baik dari agama, bahasa dan budaya, minoritas muslim Muangthai yang tinggi di Patani (Thailand Selatan), merupakan bagian dari bangsa melayu, apalagi tempat tinggalnya secara geografis perbatasan dengan Negara-negara Melayu Malaysia. Namun dari segi kebudayaan, orang Melayu- Muslim di bagian selatan Muangthai itu merupakan bagian dari bangsa melayu. Dari segi politik, orang Melayu-Muslim merupakan bagian dari bangsa Mungthai yang agama negaranya Buddha, sejak orang Melayu-Muslim secara langsung dimasukkan ke dalam kerajaan Thai, di bawah kekuasaan Chulalongkorn (Raja V) pada tahun 1902. Letak geografis keempat provinsi yaitu Patani, Yala, Naratiwat, dan Satun serta ikatan-ikatan budayanya telah membantu memupuk satu rasa keterasingan di kalangan orang Melayu-Muslim terhadap lembaga sosial, budaya dan politik Thai (Pitsuwan, 1989: 20).

Perubahan yang paling dirasakan oleh Komunitas Melayu Patani semenjak dilaksanakan program-program pembaruan dalam masa pemeritahan Pibul Songkram (1939-1944) yang langsung menyentuh dasar-dasar, orang Melayu telah menjadi mangsa dasar siamisasi dan asimilasi kebudayaan (*dasar Rathaniyom*). Pemerintah berusaha mensiamkan sekolah-sekolah Melayu dengan memasukkan kurikulum yang mengacu pada agama Budha atau malah menggantikan status sekolah Melayu muslim menjadi sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghilangkan pengaruh bahasa melayu di kalangan penduduk Patani, tidak peduli terhadap perayaan hari besar Islam, menganiaya, menahan, dan kadang-kadang membunuh para pemimpin agama dan politik yang berasal dari etnis melayu (Malik, 1993:181). Haji Sulong adalah seorang tokoh ulama Patani yang memimpin masyarakat untuk menghadapi sepak terjang “politik siamisasi” yang dilaksanakan oleh pemerintah Thai.Haji Sulong berusaha mengembangkan dakwah bernuansa Islam di tengah masyarakat. Haji Sulong pun berhasil menyatukan dan membangkitkan semangat umat Melayu Patani (Fathy, 2001: 83). Hal ini menjadi aspirasi masyarakat melayu Patani terealisasi dalam sebuah kesepakatan pada tanggal 3 April 1947, golongan melayu Patani dibawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan tuntutan7 perkara tentang pembentukan Otonomi Khusus kepada pemerintah Thai.Tuntutan itu

mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan identitas dan kemurnian bangsa Melayu yang Islam.

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Bagaimana usaha-usaha Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Bagaimana hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).

Berdasar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Mengkaji Bagaimana usaha-usaha Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). Mengkaji bagaimana hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954).

Manfaat penelitian ini: Bagi mahasiswa pendidikan Sejarah, dapat mengetahui secara jelas mengenai Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954); Bagi membaca, dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai Peranan Haji Sulong dalam memperjuangkan otomomi khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954); Bagi almamater FKIP Universitas Jember, meruakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian; Bagi peneliti lain, sebagai informasi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

TINJAUAN LITERATUR

Haji Sulong

Haji Sulong, adalah salah seorang tokoh ulama Patani yang ditakdirkan untuk memimpin masyarakat dalam menghadapi politik siamisasi atau asimilasi Kebudayaan (*Rathaniyom*) yang dilancarkan oleh pemerintahan Thailand. Haji Sulong juga terlibat dalam memperjuangkan demi memperbaiki nasib masyarakat muslim Patani, dengan menyampaikan tututan⁷ perkara kepada pemerintah Thai. Tentang pembentukan otonomi

khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di dalam lingkup wilayah Melayu Patani (Zaman, 1996: 6)

Perjuangan Otonomi Khusus

Perjuangan adalah upaya untuk membebaskan diri dari cengkaman, kezaliman, kesewenang-wenangan dan penindasan penjajahan bangsa lain. Sedangkan perjuangan Patani adalah perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri dalam mempertahankan kemandirian dan kemurnian bangsa Melayu Islam Patani (Nurdy, 2010: 7)

Patani Thailand Selatan

Patani di Thailand Selatan pada awalnya merupakan suatu kerajaan yang berdiri sendiri, yang dikenal sebagai Kerajaan Patani. Patani adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri sesuai dengan kultur Melayu dan landasan agama Islam yang dianut kerabat kerajaan dan masyarakat. Negeri Patani merupakan kerajaan yang makmur dan terkenal sebagai pelabuhan utama yang menguasai perairan di Asia Tenggara (Malek, 1993:23).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 1975: 18). *Heuristik*, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947- 1954). *kritik* sumber dilakukan secara intern dan ekstern. Pada kegiatan kritik intern peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan.

Interpretasi, peneliti berusaha usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta sejarah yang mempunyai kesusuain satu sama lain yang kemudian dilakukan suatu penafsiran agar bermakna, dilakukan untuk menentukan makna yang saling berkaitan dalam fakta-fakta yang telah diperoleh merangkai, dan menghubungkan antara fakta satu

dan fakta lain secara kronologis agar membentuk kesatuan fakta yang sistematis, logis, rasional, dan faktual dengan berdasarkan pada aspek pembahasan yaitu mengenai Peranan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947-1954). *Historiografi*, peneliti berperan untuk merekonstruksi tulisan secara analitis, kronologis, dan sistematis cerita dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh melalui langkah-langkah penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berikut ini akan dibahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini

Latar Belakang Perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani

1) Riwayat Hidup Haji Sulong bin Abdul Kadir

Haji Sulong Al-Fathoni atau Muhammad bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Tuan Minal dilahirkan di kampung Anak Ru, Patani pada tahun 1895. Haji Sulong merupakan anak tunggal dari Haji Abdul Kadir dengan istrinya yang pertama, Syarifah (dipanggil Che' Pah). Ibunya meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Haji Sulong baru berusia 12 tahun. Gelaran Sulong adalah karena Haji Sulong merupakan anak sulung dalam keluarganya. Pendidikan awal yang diterima oleh Haji Sulong ialah pelajaran membaca Al-Qur'an. Gurunya ialah Haji Abdul Kadir ayahnya sendiri. Haji Sulong adalah seorang kanak-kanak yang banyak humor tetapi cerdas dan pintar (Zaman, 1996: 1). Diusia 8 tahun, ayahnya mengirimkan Haji Sulong untuk belajar agama di pondok Haji Abdul Rashid, kampung Bandar, Sungai Pandan Patani, Ketika berusia 12 tahun, Haji Sulong meninggalkan tanah air untuk belajar agama di Makkah al-Mukarramah.

Haji Sulong mulai mendirikan rumah tangga dengan Cik Sofiah binti Omar. Setahun saja berumahtangga, istrinya meninggal dunia sebelum sempat mendapat anak. Dua tahun kemudian, Haji Sulong menikah lagi dengan Hajah Khadijah binti Haji Ibrahim, Mufti Kelantan. Haji Sulong terkenal alim dalam bahasa arab dan menguasai sastra arab di mana kebolehnya diakui oleh orang-orang yang ahli di kalangan masyarakat arab sendiri. Haji Sulong mencari ilmu di Makkah selama 20 tahun. Tahun 1924, Haji Sulong pulang ke tanah airnya dengan rencana menetap selama dua tahun untuk menghibur hati istrinya yang amat sedih atas kehilangan anak pertamanya yang bernama Mahmud yang meninggal

dunia dalam usia dua tahun (Zaman, 1996: 2). Awalnya Haji Sulong tidak bermaksud melibatkan diri ke dalam perjuangan rakyat Patani, namun kecerdasannya dalam beberapa pertumbuhan keagamaan dan kebijakan, sedikit demi sedikit membuat beliau sadar akan kondisi rakyat dan keadaan negeri Patani yang memprihatinkan. Tahun 1945, Haji Sulong menjabat sebagai ketua Majlis Agama Islam Patani. Pada 3 April 1947, golongan Melayu Patani Raya di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan tuntutan tujuh perkara yang membahas tentang otonomi daerah kepada pemerintahan Thai.

2) Program Asimilasi dan Penghapusan Budaya Melayu

Pada 24 Jun 1932, kerajaan Siam telah mengalami perubahan besar dalam sejarah politik Thai. Sekumpulan pegawai muda tentara dan masyarakat awam di bawah pimpinan Phya Bahol, Phya Song dan Pridi Phanomyong telah merampaskan kuasa dan mengubah sistem pemerintahan negara Siam, dari sistem pemerintahan kerajaan mutlak kepada sistem pemerintahan kerajaan berperlembagaan. Pemimpin-pemimpin Islam di Bangkok, seperti Haji Samsuddin Mustapha (Chaem Promyong), dan Haji Wahab (Bachong Sricharoon) juga ikut berserta dalam rampasan kuasa kali ini. Tujuan revolusi adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran hidup kepada seluruh warga negara Siam atau Thai.

Perubahan ini sangat dirasakan oleh orang-orang Melayu di empat provinsi selatan, dengan di bawah sistem berperlimen ini, orang-orang Melayu Patani percaya bahwa akan memperoleh konsesi dari kerajaan pusat untuk mengekalkan Otonomi Khusus Patani yang berhubungan dengan agama, budaya dan bahasa orang Melayu Patani, sama dengan tujuan revolusi. Semasa pemerintahan Phya Bahol (1933- 1938), sudah terdapat beberapa strategi yang dipersiapkan untuk melakukan program asimilasi ke atas penduduk minoritas di seluruh Negara Thailand, termasuk masyarakat Melayu di Patani. Salah satu program asimilasi tersebut dilaksanakan melalui program pendidikan sejak sekolah dasar. Di bawah undang-undang pendidikan, semua kanak-kanak yang cukup usia persekolahan diwajibkan belajar di sekolah kerajaan Siam dan tidak dibenarkan mengikuti pendidikan di luar sekolah pemerintah, termasuk sistem pengajian pondak pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Sejak dari awal lagi pembelajaran Siam dijalankan dengan pengajaran agama

Buddha ini, dikarenakan sami-sami Buddah yang bermain peran penting dalam bidang pendidikan (Nurdi, 2010: 77).

Masyarakat Melayu melaku penolakan dan menghindari diri dari, lembaga pendidikan kerajaan Siam. Bagaimanapun rupa-rupanya pemerintahan Siam sudah mempunyai rancangan untuk tahap berikutnya, yaitu merekrut anak-anak muda Melayu ke dalam program wajib tentara. Dua komposisi asas ini, yaitu asimilasi Siam melalui sistem pendidikan dan rekrut ketenteraan di kalangan anak-anak muda Melayu, akhirnya melahirkan kemarahan terhadap orang Melayu di seluruh wilayah Patani semakin bertambah. Dasar yang menindas mulai diterapkan sebagai reaksi pemerintahan Siam (Thailand). Penggunaan tulisan Jawi sebagai tulisan Melayu dilarang sama sekali, dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan juga dilarang. Bahkan penggunaan nama Melayu Islam juga dianggap sebagai suatu bentuk penentangan ke atas dasar negara. Siamisasi membuat anak-anak Melayu secara perlahan-lahan pasti berpindah menjadi Buddha, atau setidaknya-tidaknya mulai meninggalkan budaya Melayu dan agama Islam yang selama ini menjadikan sebahagian yang penting dalam kehidupan orang Melayu Islam di Patani (Nurdi, 2010: 80)

3) Dasar Phibun Songkram dan Politik Rathaniyom

Phibul Songgram seorang pemimpin kanan tentera, mengambil alih pemerintahan daripada Phya Bahol pada bulan Disember 1938. Phibun Songgram adalah seorang ultra-nasional yang bercita-cita besar dan berdisiplin. Dengan mempunyai latar belakang pendidikan Eropah, berusaha membentuk Negara Thai sebagai sebuah negara nasional modern yang maju. Phibun melancarkan suatu program dengan bertujuan untuk menjadikan semangat kebangsaan Siam. Kesedaran hanya dapat tercapai melalui sosial-budaya yang berasaskan konsep nasionalisme (Nurdi, 2010:66).

Rathaniyom (Negara Thailand hanya untuk rakyat Thailand) telah dikemukakan oleh Phibun Songgram sebagai ideologi politik negara. *Rathaniyom* adalah kebudayaan negara yang dibentuk oleh menteri kabinet dan digunakan sebagai dasar arahan dari jabatan perdana menteri. Bertujuannya untuk menjadikan kebudayaan tersebut sebagai budaya tetap negara yang bulih dihayati oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. *Rathaniyom* mempunyai 12 pasal, yang di keluarkan antara 1939-1942.

Perkara tersebut adalah: (1). Penggunaan nama negara, rakyat dan bangsa, (2). Bahaya yang menjejaskan bangsa, (3). Panggilan nama rakyat Thai, (4). Menghormati bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan lagu pujaan raja, (5). Dorongan supaya orang Thai menggunakan barang asas buatan negara Thai, (6). Gaya dan isi nyanyian lagu kebangsaan, (7). Mengajak orang Thai berkerjasama membangunkan bangsa, (8). Nyanyian lagu memujikan raja, (9). Bangsa dan bahasa Thai serta tanggungjawab warga negara yang baik (10). Pakaian warga negara Thai, (11). Kerja harian orang Thai ,(12). Pertolongan dalam bentuk memberi perlindungan terhadap kanak-kanak, orang tua dan orang lemah . Dari pada 12 pasal, hanya 3 pasal yang mendesak masyarakat Islam secara langsung yaitu *Rathaniyom* pasal 3, 9 dan 10(Chapakiya, 2002:93).

Usaha-usaha dan perjuangan Haji Sulong dalam mempejuangkan Otonomi Khusus Patani

1) Pendirian Lembaga Pendidikan dan Politik

keadaan masyarakat Patani sedang mengalami konflik dengan pemerintah Thai, maka dianugerah oleh Ilahi seorang tokoh yang bernama Haji Sulong. Haji Sulong adalah seorang tokoh ulama Patani yang memimpin masyarakat Patani dalam menghadapi dasar kebudayaan (*Rathaniyum*), yang diciptakan oleh Perdana Menteri Phibul Songgram, sehingga Haji Sulong terkenal, Haji Sulong dianggap sebagai Bapak Perjuangan Patani. Haji Sulong adalah termasuk golongan ulama yang terlibat dalam politik dan menentang keras terhadap campur tangan dengan pemerintah Thai dalam urusan kultural, Kemelayuan dan agama.

2) Pendirian Lembaga Pendidikan

Haji Sulong membangun sebuah Madrasah, Madrasah al-Ma'arif al-Wathoniah. Menurut keterangan yang sempat diperoleh, sekolah ini adalah sekolah agama yang pertama seperti pernah didirikan di Patani. Walaupun demikian, masyarakat Patani yang pada waktu itu, malah sampai sekarang pun, yang lebih mengenal institusi "Pondok" sebagai tempat belajar agama, menerima baik penubuhan sekolah ini.

Madrasah ini merupakan sekolah agama pertama di Patani. Struktur organisasi dan disiplin pembelajaran yang teratur. Disini pelajar-pelajar diperkenalkan dengan sistem berkelas, sukatan pelajaran dan pelajar pula menjalani latihan berbaris yang kemas dan bersemangat (Zaman, 1996: 8). Para pemerhati beranggapan bahwa ada maksud lain bagi Haji Sulong dibalik pembaharuan dalam sistem dan corak pendidikan yang diperkenalkan kepada masyarakat Patani ini. Keadaan ini menjadi lebih dipahami apabila mengingat adanya kalimat al-Wathoniah, yang bermaksud "Kebangsaan" pada papan tanda nama sekolah ini. Meskipun mendapat sambutan baik daripada masyarakat, tetapi sekolah ini ditakdirkan tidak berusia lama. Setelah berjalan antara 2 hingga 3 tahun, sekolah ini menerima perintah penutupan dari pihak berkuasa kerajaan Thai yang sangat merasa curiga atas sambutan dan perkembangannya (Fathy, 1994: 83).

3) Pendirian Lembaga Politik

Tidak lama setelah Phibul menjadi perdana menteri dan melancarkan semboyan Thai Rathaniyumnya, Haji Sulong mendirikan al-Hai'ah al-Tanfiziah li al-Ahkam al-Shar'iyah (Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari'ah), Tujuannya untuk mendidik masyarakat Patani agar memahami hukum agama secara tepat. Hal ini dilakukan sebagai upaya tandingan terhadap kegiatan pemerintah Siam yang ingin men-Siamkan orang Melayu dan menodai kesucian ajaran agamanya. Sudah dipahami bahwa kedatangan Haji Sulong, pada awalnya, tidak ingin terlibat dengan perpolitikan di Patani. Kondisi ketidakadilanlah yang membuat Haji Sulong tidak sanggup untuk berdiam diri, Haji Sulong pun mulai berpartisipasi dalam bidang politik.

Haji Sulong termasuk golongan ulama yang mencurigai keterlibatan kerajaan dalam urusan agama. Haji Sulong berpendapat bahwa campur tangan politik dalam soal-soal hukum agama sejak masa Raja Chulalongkorn telah merusak kemurnian dan kesucian Islam. Terlepas dari ada tidaknya kerjasama antara orang Islam dengan kerajaan, Haji Sulong berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya diurus oleh lembaga kehakiman Islam tersendiri (Fathy, 2001: 85).

4) Perjuangan Menuntut Otonomi Khusus Melalui Tuntutan 7 Perkara

Tanggal 1 April 1947, diadakan pertemuan di antara pemimpin-pemimpin masyarakat Melayu wilayah Selatan di Patani. Hasil dari pertemuan itu adalah kesepakatan untuk menyerahkan sebuah memorandum yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Melayu di Selatan kepada wakil-wakil kerajaan Thai sewaktu mereka melakukan kunjungan ke Patani. Pada tanggal 24 Agustus 1947, Haji Sulong (Ketua Majelis Agama Islam Patani) dan Wan Uthman Wan Ahmad (selaku Pengurus Persekutuan Semangat Patani) secara resmi menyerahkan memorandum tersebut kepada 7 orang utusan pemerintah yang berkunjung ke Patani. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 3 April 1947, Haji Sulong mengirimkan secara langsung memorandum tersebut kepada Perdana Menteri (Fathy, 1994: 83).

Memorandum ini berisi tuntutan tujuh perkara yang mengarah pada pemberian daerah Otonomi Khusus di empat wilayah Selatan. Tujuh tuntutan ini yang nantinya dikenal dengan nama "Tujuh Tuntutan Haji Sulong" meliputi:

1. Pengangkatan seorang komisaris tinggi untuk memerintah Daerah Patani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat, menskors, atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu; orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diadakan khusus untuk tujuan itu;
2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintah di daerah itu harus Melayu Patani (untuk mencerminkan rasio penduduk);
3. Bahasa Melayu dan Bahasa Siam akan menjadi bahasa resmi;
4. Bahasa Melayu akan diajarkan di sekolah dasar;
5. Hukum Islam akan diberlakukan di empat wilayah Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun dengan pengadilan-pengadilan Islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah;
6. Semua hasil pajak di empat wilayah – Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat selatan;
7. Majelis Agama Islam propinsi akan diberi wewenang penuh atas perundang-undangan menurut hukum Islam mengenai semua urusan Melayu dan kebudayaan Melayu, dibawah wewenang Komisaris Tinggi seperti yang disebut dalam No. 1 (Pitsuwan, 1989: 117).

Berdasarkan tujuh tuntutan tersebut, tidak ada satu pun tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri, karena Haji Sulong tidak menginginkan pembentukan sebuah negara merdeka, yang diharapkan adalah daerah Otonomi Khusus agar wilayah Selatan dapat mempertahankan identitas serta sifat-sifat khasnya. Keinginan ini seolah menjadi syarat minimal yang harus terpenuhi karena golongan Melayu Patani akan tetap mengupayakan kelangsungan cara hidup tradisionalnya serta menjaga kemurnian agama yang mereka anut.

Reaksi Terhadap Perjuangan Haji Sulong

1) Tanggapan dari pemerintah

Ketegangan yang semakin meningkat di keempat-empat wilayah di Selatan Thai Setelah penahanan Tuan Guru Haji Sulong serta kritikan-kritikan tajam dari Tanah Melayu berhubung dengan dasar kerajaan Thai terhadap orang-orang Melayu itu telah menimbulkan keresahan kepada kerajaan Aphaiwong dan memaksanya bertindak bagi mengawal keadaan itu. Kerajaan Thai telah menghantar Phraya Ramajbhakdi, Ketua pengarah Kementerian Dalam Negeri, untuk membuat penyiasatan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkannya, Menteri Dalam Negeri menafikan bahawa kekacauan besar telah berlaku di keempat-empat wilayah di selatan, seperti yang didakwa oleh akhbar-akhbar dan pertubuhan politik Semenanjung Tanah Melayu (Mahmud, 2006: 84).

Kenyataan Phraya Ramabhakdi itu juga telah ditakutkan oleh Senator Nai Banchong Sricaroon atau Haji Wahab dalam perbahasan di parlimen di Bangkok pada 5 Mac 1948. Inilah kali pertamanya isu Patani dibangkit dan dibahaskan di sidang parlimen. Senator Banchong menyalahkan pegawai-pegawai tadbir Thai di atas kekacauan di wilayah selatan. Para pegawai tersebut bersikap keras dan menindas penduduk-penduduk tempatan sehingga mencetuskan perasaan tidak puas hati orang-orang Melayu terhadap kerajaan. Beliau menganggap pegawai-pegawai tersebut "tidak lebih daripada pengganas" Penduduk-penduduk tempatan telah ditindas dan diperas, harta-benda mereka dirampas secara paksa, rumah mereka dibakar hangus; manakala bahasa, adat-resam dan agama mereka dicabuli. Tidak ada seorang pun daripada mereka berani untuk mengadukan kejadian ini kepada pihak kerajaan kerana bimbang pegawai-pegawai berkenaan membalas dendam (Mahmud, 2006: 85).

Memang benar sesuatu mestilah dibuat bagi mengatasi masalah itu, tetapi itu tidak memadai. Akibat daripada dakwaan ini, Nai Banchong Sricharoon mendesak kerajaan supaya mengambil langkah-langkah segera dan positif bagi mengatasi masalah yang dikemukakan itu. Beliau juga meminta kerajaan mengisi jawatan Chularajamontri yang telah dikosongkan oleh Chaem Promyong. Khuang Aphaiwong, dalam jawapannya, mengakui bahawa kekacauan sememangnya wujud di wilayah-wilayah Selatan Thai, Beliau memberi jaminan bahawa sebuah jawatan kuasa khas akan dibentuk oleh kerajaan bagi mengkaji punca kekacauan di wilayah tersebut.

2) Tanggapan dari Masyarakat Melayu Patani

Apabila berita penangkapan Haji Sulong tersebar luas, maka timbullah reaksi dari pada masyarakat Melayu didalam dan diluar negeri. Pada 19 Januari 1948, terjadilah demonstrasi di hadapan balai polis teluban, tempat penahanan Haji Sulong. Para hadirin yang datang berkumpul menuntut ikat jamin dibenarkan bagi membebaskan Haji Sulong dari pada penjara. Tetapi ternyata tuntutan itu tidak mendapat layanan. Haji Sulong di pindahkan ketahanan di Patani. Pada 22 Januari 1948, terjadi lagi perhimpunan dan kali ini pemimpin agama yang terdiri dari pada To'Guru dan To'Imam, berjumlah ratusan orang datang berkumpul di pejabat Majlis Agama Islam wilayah Patani menyatakan kesetiaan dan kebimbangan terhadap pemimpin mereka yang sedang berada di dalam tahanan. Reaksi masyarakat Melayu ini menyebabkan kerajaan merasa bimbang dan khawatir terhadap perkembangan ini. Lantaran itu, pembicaraan hal Haji Sulong itu di pindahkan ke Mahkamah wilayah Nakhonsitamarat (legor) (Chapakia, 2002: 112).

Walau bagaimanapun, ada di kalangan pemimpin masyarakat Melayu yang berada dalam negeri masih berpandangan bahwa masalah di Selatan perlu diselesaikan secara damai. Antara langkahnya ialah meneruskan rancangan rundingan secara langsung antara Tengku Mahmud Mahyiddin dengan kerajaan pusat di Bangkok. Pertemuan secara tidak resmi berlaku antara Tengku Mahmud Mahyiddin dengan Ci'Abdullah Long Putih bertempat di Kota Baru, Kelantan. Beliau mengemukakan tiga syarat utama yaitu: (1). Hendak dibebaskan Haji Sulong dari pada tahanan dan di benarkan mengambil bagian dalam rundingannya, (2). Hendak di panggil kembali semua ketua Melayu yang telah berhijrah dari Selatan Siam, (3). Kerajaan Siam memberitahu kepada wakil kuasa besar di

Bangkok tentang adanya rundingan itu (Chapakia, 2002: 113). Tetapi syarat tersebut tidak di terima oleh kerajaan Thai. Dengan itu, rancangan perundingan berhenti.

Hasil perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani.

1) Respon pemerintahan terhadap Tuntutan 7 Perkara

Pada masa pemerintahan Nai kuang, kerajaan Siam telah mendirikan sebuah jawatan kuasa pemeriksaan atau penyiasat hal ihwal di empat provinsi Thailand Selatan yaitu: Patani, Yala, Narathiwat dan Setul. Sebuah jawatan kuasa itu termasuklah Haji Shamsuddin Mustapha dan Encik Abdullah Lang Puteh yang kemudiannya menjadi wakil rakyat di Setul. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Nai Prakob Bunyaprasop yaitu Gubernur Bahagian Selatan. Pada awal April 1947, telah tersiar dalam akhbar-akhbar tempatan bahwa pemeriksaan atau penyiasat akan melawat atau mengunjungi provinsi Thailand Selatan termasuk Patani.

Rombongan jawatankuasa penyiasat berjanji akan menyampaikan surat permohonan 7 perkara itu kepada kerajaan Bangkok. Namun selama empat bulan tidak ada jawapan. Pada 9 Agustus 1947 melalui surat kementerian kehakiman Bangkok Bil. 5385/2490 jelas memberikan jawapan bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan mahkamah syariah dari mahkamah sivil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Setelah mendapat jawapan itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan berkenaan pelantikan kadhi (Datuk Yutitam) dan mulai mengumpul kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Kerajaan Bangkok telah membuatkan satu peraturan bagi masyarakat Islam di Patani (Thailand Selatan) dengan, melantikan seorang pengadilan (Datuk Yutitam) menjadi kadi di provinsi yang berkenaan dan juga menjadi penasihat undang-undang sivil. Kerajaan hanya memberikan kekuasaan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pusaka dan nikah cerai saja, tidak diberikan kekuasaan sebagaimana hakim dalam hal ihwal Islam seluruhnya. Datuk Yutitam hanya boleh memberikan pandangan saja kepada hakim dan hakim kerajaan boleh menerima atau menolaknya, Haji Sulong tidak memuaskan (Mahmud, 2006: 72)

Kemudian Haji Sulong terus mendesak kerajaan Siam dengan tuntutan 7 perkara itu. Tentangan Haji Sulong dirasakan oleh kerajaan Thai, Akibat tuntutan 7 perkara tidak

mendapat persejuaan dari kerajaan Thai, kama Haji Sulong menjalankan aktivitasnya di masjid dan pesantren-pesantren untuk menggerakkan dan menanamkan semangat patriotisme dikalangan rakyat Melayu Islam Patanip demi menegakkan syariah Islam dan menuntut keadilan (Mahmud, 2006: 73).

2) Perjuangan Rakyat Setelah Haji Sulong Wafat

Tahun 1954, perjuangan umat Melayu Patani menemui kemerosotan berikutan dengan kematian pemimpinnya yang terkemuka, Tengku Mahmud Mahyiddin dan pembunuhan kejam keatas tuan Guru Haji Sulong dan para pengikutnya. Turut sama menjadi mangsa pembunuhan yang tidak berprikemanusiaan itu ialah anak Haji Sulong bernama Muhammad, Haji Wan Muhammad Amin, Haji Wan Osman Wan Ahmad dan Lebai Ishak Abbas.

Pada tahun 1957 muncul pergerakan sulit, yaitu gerakan bawah tanah (Gerilya) yang dipimpin oleh pejuang Melayu Patani yang tidak berhenti mendesak Kementerian Dalam Negeri menubuhkan sebuah Universitas Melayu bertempat di Wilayah-wilayah Selatan Thai. Mereka juga mendesak supaya menukarkan para pegawai pentadbir Thai yang bukan beragama Islam. Akhirnya pergerakan ini mendesak supaya setiap tahun mesti dikosongkan sekurang-kurangnya 10 tempat bagi pelajar Islam memasuki Akademik Polisi dan Tentara, menerusi satu ujian yang persaingan di bawah sistem kuota khas. Tuntutan paling baru ini dibuat setelah melihat kejayaan orang-orang Melayu umat Islam di Malaya yang telah mendapatkan kemerdekaan mereka pada 13 Agustus serta menggagalkan hasrat orang-orang Melayu Patani untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan menerusi percantuman (Malik, 1993: 224).

Kekuasaan Thailand berada ditangan kekuasaan tentera yang dipimpin oleh Sarit Thanarat, beliau telah merancang dan melaksanakan politik asimilasi secara paksa terhadap masyarakat Melayu di Thailand Selatan, masyarakat Melayu Patani pada ketika itu tidak berdaya dan tidak ada kesempatan untuk berbantah dan menahan tekanan politik itu. Maka atas dasar kekerasan dan paksaan itulah para pemimpin dan para ulama Patani tidak berani untuk menampilkan bergerak seperti mana tokoh-tokoh yang sebelumnya seperti Haji Sulong, Tengku Mahmud Mahyiddin dan sebagainya. Keadaan seperti ini terpaksa masyarakat Melayu Patani yang dipimpin oleh para ulama, tokoh politik dan cendikiawan bergerak dan

berperan secara illegal (Chapakia, 2002: 138). Sejak awal tahun 1960-an pemimpin masyarakat Patani yang terdiri tokoh politik, bangsawan dan ulama telah sepakat untuk bergerak dan berperan membentuk organisasi perjuangan yang bertujuan menentang kerajaan Thai. Gerakan itu yang beroperasi di daerah Patani Raya terdapat 3 organisasi yang utama. Sementara mereka sama-sama mengejar tujuan akhirnya yang sama, yakni pemerintahan sendiri, malah dari segi orientasi, ideologis, taktik dan lingkup operasi ada beberapa perbedaan, tergantung kepada latar belakang dan komposisi pemimpin serta keanggotaannya. Adapun organisasi itu ialah Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Liberation organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

3) Barisan Revolusi Nasional (BRN)

Tengah-tengah masyarakat Patani sedang menghadapi dengan beberapa kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Sarif Thanarat. Pada 13 Maret 1960, para pemimpin Patani yang terdiri dari beberapa kalangan baik itu dari tokoh politik, tokoh ulama dan bangsawan mengambil langkah untuk menumbuhkan sebuah organisasi perjuangan yang dinamakan Barisan Revolusi Nasional (BRN), Tujuan Barisan Revolusi Nasional (BRN) ialah untuk mempersatukan kumpulan pejuang yang ada supaya menjadi sebuah pertumbuhan yang satu untuk sama-sama meraih dan usaha untuk sampai cita-cita yang dicita-citakan yaitu kemerdekaan Patani (Fathy, 2001: 126).

4) Patani United Liberation Organization (PULO)

Sekian banyak organisasi yang berada di Selatan Thai. BRN yang kita sudah bicarakan diatas dan merupakan organisasi tertua di masyarakat Patani, namun BRN tidak selamanya utuh dan bisa bersatu. BRN mengalami perpecahan di kalangan para pemimpin yang berlainan ideologi. Pada tahun 1968, Patani United Liberation Organization (PULO) dibentuk, PULO dianggap oleh masyarakat Patani merupakan organisasi yang mengordinasikan banyak kelompok gerilya untuk memerangi pemerintah Thai. PULO dianggap lebih praktis, senjata lebih meluaskan dan imbauannya kepada semua pihak/unsure dalam masyarakat Patani (Pitsuwan, 1989: 179).

5) Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)

Setelah organisasi yang pertama di Patani tidak bisa bersatu hingga terusnya dan ada retakan pihak atasan, maka dengan perpecahan BRN itulah munculnya BNPP. Bagi mereka yang tidak setuju dengan pemahaman ideologi Ustaz Karim, mereka itu membangun sebuah organisasi baru yang bernama Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP). BNPP sebagai wadah perjuangan yang kumpulannya kebanyakan yang memisahkan diri dari BRN atas dasar perbedaan ideologi. BNPP didirikan pada tanggal 20 Mei 1972 di Malaysia, BNPP di pimpin oleh beberapa orang terkemuka diantaranya: Idris Pakyeh, Cekgu Umar, Tengku Abdul Jalal. Markas besarnya terletak di kawasan bukit besar Budur di wilayah Naratiwat (Fathy, 1994: 130). Demikian, selain daripada organisasi yang sebut diatas masih ada beberapa organisasi yang bergerak dan berperan di Patani dan diantara organisasi inilah yang membawa dan berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Patani yang lebih baik, namun ketiga-tiga inilah yang sangat berperan dan sangat dominant dalam masyarakat Patani, dan selalu mencemaskan oleh pemerintah Thailand.

KESIMPULAN DAN SARAN

Latar belakang Perjuangan Haji Sulong dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani disebabkan karena, Pertama, adanya perbedaan agama, tradisi dan nasionalisme yang sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Melayu Patani dan yang kedua, adanya kebijaksanaan pemerintah Thai yang mendiskriminasikan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan baik di bidang Ekonomi, Politik, Hukum maupun di bidang Sosial Budaya. Tengah-tengah masyarakat Patani sedang mengalami konflik dengan pemerintah Thai, maka dianugrah oleh Ilahi seorang tokoh yang bernama Haji Sulong.

Usaha-usaha Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani dalam menghadapi dasar kebudayaan (*Rathaniyum*) yang diciptakan oleh Phibul Songgram. Metode perjuangan yang dilakukan oleh Haji Sulong adalah untuk mendapatkan Otonomi Khusus yang bisa mempertahankan identitas dan kebudayaan Melayu dengan ciri khasnya serta agama Islam sebagai agama bangsanya sendiri dari pemerintah Thai dan ini dikenal dengan Tujuh Tuntutan Haji Sulong. Tujuh pasal ini isinya, bertujuan untuk mendapatkan sebuah daerah yang memiliki otonomi khusus bagi

seluruh rakyat Patani di Thailand Selatan, dan bukan untuk mendirikan sebuah Negara yang merdeka, karena negeri Patani sudah menjadi sebuah daerah integrasi Thailand dan untuk melepaskan diri dari cengkraman kerajaan Thai sangatlah sulit.

Hasil Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan Otonomi Khusus Patani melalui Tuntutan 7 perkara tidak berhasil sehingga sampai saat Haji Sulong meninggal dunia, dengan kematian Haji Sulong itu, sangat luar biasa sekali sehingga menjadikan satu peristiwa yang sangat mengerikan bagi masyarakat Melayu Patani, dan setelah Haji Sulong meninggal dunia, maka bangkitlah beberpa organisasi pembebasan Melayu Patani, dari sekian banyaknya organisasi yang berperan di Masyarakat Patani, namun yang paling dominan diantara organisasi itu hanya ada 3 organisasi, dan ketiga-tiga organisasi itu selalu dipikirkan oleh pemerintah Thai, bahwa ketiga organisasi ini akan membentuk gerakan-gerakan, menentang pemerintahan Thai untuk mendapat hak kebebasan dan keadilan sepertimana yang diperjuangkan oleh Haji Sulong. Adapun ketiga organisasi itu adalah: Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran, yaitu: (1) penulis menyarankan kepada masyarakat umum dan pemuda-pemudi untuk lebih memperhatikan ilmu-ilmu sejarah khususnya sejarah Patani; (2) masih banyak sejarah Patani yang belum diteliti oleh masyarakat dan penulis menyarankan kepada mahasiswa selanjutnya khususnya mahasiswa dari Patani untuk mengkaji sejarah Patani yang sudah lama lenyap dan membangkitkan kembali semangat pemuda-pemudi Patani; (3) penulis skripsi ini memang jauh dari kesempurnaan dan kelengkapan, karena keterbatasan bahasa yang dimiliki penulis sehingga penulis dari skripsi ini memintak sanan dan Kritik yang membangun untuk Penulis kedepan, dengan demikian akan ada perbaikan-perbaikan dalam diri penulis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Husam Lamato mengucapkan terimakasih kepada Drs. Sumarno, M.Pd., dan Dr. Nurul Umamah, M.Pd. yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesainya jurnal ini. Penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada teman-teman sekalian yang telah membantu penulis dan memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapakia, A.O. (2002). *Politik dan Perjuangan Masyarakat Patani Selatan Thailand 1902-1922*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Che'daud, I. (1988). *Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Malayu*. Kota Baharu: Majlis Agama dan adat Istiadat Melayu Kelantan.
- Fathy, A. (1994). *Pengantar Sejarah Patani*. Alor Star : Pustaka Darussalam.
- Fathy, A.(2001a). *Ulama Besar Dari Patani*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia.
- Fathy, A. 2001b).*Pengantar Sejarah Patani*. Kelantan: Aman Peris.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah. Terjemahan*.oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahmud, N.A. (2006). *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1945*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Malek, M.Z. (1993).*UmatIslam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia: Hisbi Shah Alam.
- Nurdi, H. (2010). *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Perjuang penindasan dan Cita-cita Perdamaian*. Kuala Lumur: Alam Raya Enterprise SDN BHD.
- Pitsuwan, S. (1989). *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Zaman, M. K. (1996). *Fatani 13 Ogos*. Kelantan: tp.